

Harmonisasi Kewajiban dan Hak Negara (Pilar Kedaulatan Rakyat dan Kemakmuran Bersama)

M. Habib^{1*}, Azlifri Ananda Putra², Sasmi Nelwati³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol^{1,2,3}, Padang, Indonesia

h4bib.0212@gmail.com¹, azlifrianandaputra@gmail.com², sasminelwati@uinib.ac.id³

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 6 Juni 2024
Halaman : 697-703

Keywords:

Harmonization
Sovereignty
prosperity

Abstract

This article discusses the importance of harmonization between rights and obligations in the context of Indonesian law and society. The balance of rights and obligations is a fundamental principle underlying the relationship between individuals, society and the state. Using literature review research, it is found that rights as interests protected by law provide individual freedom, while obligations establish norms of behavior with legal consequences. This balance is essential to create a just and prosperous society. In a democratic context, this balance supports the pillars of popular sovereignty and shared prosperity. However, challenges such as the imbalance of rights and obligations practices still hamper, requiring stronger efforts for fair alignment. Through descriptive-qualitative research, this article analyzes the concept, implementation, as well as the problems faced, with the hope of providing solutions to strengthen the legal system and an equitable society in Indonesia.

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia. Keseimbangan hak dan kewajiban adalah prinsip fundamental yang mendasari hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Hak sebagai kepentingan yang dilindungi hukum memberikan kebebasan individu, sementara kewajiban menetapkan norma perilaku dengan konsekuensi hukum. Keseimbangan ini esensial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks demokrasi, keseimbangan ini mendukung pilar kedaulatan rakyat dan kemakmuran bersama. Namun, tantangan seperti ketidakseimbangan praktik hak dan kewajiban masih menghambat, membutuhkan upaya yang lebih kuat untuk penyelarasan yang adil. Melalui penelitian deskriptif-kualitatif, artikel ini menganalisis konsep, implementasi, serta permasalahan yang dihadapi, dengan harapan dapat memberikan solusi untuk memperkuat sistem hukum dan masyarakat yang berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci : harmonisasi, kedaulatan, kemakmuran

PENDAHULUAN

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Hak memberikan kenikmatan dan keluesan kepada individu dalam melaksanakannya (Sudikno:2005) Kewajiban merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku sebaliknya. Konsep kewajiban hukum pada dasarnya terkait dengan konsep sanksi. Subyek dari suatu kewajiban hukum adalah individu yang perilakunya bisa menjadi syarat pengenaan sanksi sebagai konsekuensinya. Hak dan kewajiban adalah pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual dalam satu pihak yang tercermin pada kewajiban dari pihak lain. Hak kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan seseorang oleh hukum (Ari Hernawan: 2021)

Keseimbangan hak dan kewajiban adalah prinsip yang mendasari hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka seiring dengan hak-hak yang mereka miliki. Dalam konteks hukum, keseimbangan ini menjadi landasan bagi terciptanya keadilan dan perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami dan menghormati hak dan kewajiban mereka serta hak dan kewajiban orang lain.

Dengan memahami dan menghormati hak dan kewajiban tersebut, maka akan tercipta lingkungan yang harmonis dan damai di dalam masyarakat. Namun, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk selalu mengingat prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semuaarganya.

Dalam penyelenggaraan Negara yang demokrasi pelaksanaan keseimbangan hak dan kewajiban perlu diterapkan agar tercapainya pilar kedaulatan dan kemakmuran rakyat. Negara Indonesia adalah Negara yang menerapkan sistem demokrasi, maka negara harus memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi terhadap keputusan dalam penyelenggaraan Negara ini. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang diambil merupakan hasil dari kehendak mayoritas rakyat yang sah. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan dapat terwujud dalam masyarakat, serta menjaga agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan dalam sistem pemerintahan. Dengan memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, setiap individu dapat turut serta dalam membangun negara yang adil dan sejahtera bagi semuaarganya.

Sebagai warganegara kita perlu memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, setiap individu dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di tengah masyarakat. Dengan demikian, konflik dan ketidakadilan dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, ini terkait dengan tantangan dan hambatan dalam mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban, bagaimana semestinya penyelenggaraan hak dan kewajiban agar dapat diharmonisasikan, mengingat masih banyak dilihat terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Rakyat Indonesia sendiri terkadang masih banyak yang melalaikan terhadap kewajiban yang mesti dilakukukannya, begitu juga negara terkadang masih melalaikan kewajiban yang mesti ditunaikan terhadap warga negaranya, sehingga rakyat tidak mendapatkan yang mestinya menjadi hak mereka. Hal ini menyebabkan Negara melepaskan tanggung jawab mereka terhadap rakyatnya.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) penelitian kepustakaan ini adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya (Asmendri: 2012). Melalui penelitian kepustakaan penulis dapat mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Melalui sumber-sumber yang didapatkan penulis mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap informasi yang didapat.

Selanjutnya penulis melakukan beberapa tahap dalam melakukan penulisan seperti memeriksa kembali sumber dan informasi yang didapatkan seperti kejelasan informasi, informasi yang sesuai dengan judul yang akan dikembangkan dan kualitas dari referensi. Selanjutnya penulis melakukan pengelompokan informasi yang didapatkan sesuai dengan kerangka yang dibutuhkan kemudian penulis menemukan hasil penelitian, menganalisis dan dihasilkan solusi dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak dan Kewajiban Negara

Hak adalah kewenangan warga negara untuk melakukan sesuatu sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh warga negara. Konsep kewajiban negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara, dan merupakan tindakan atau sikap yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan individu (Toba: 2021) Kewajiban

negara juga mencakup penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai kewajiban mendasar yang tidak dapat diingkari oleh negara (Farida: 2022)

Konsep hak dan kewajiban negara merupakan dua sisi dari sebuah koin yang saling terkait. Hak-hak warga negara harus dihormati dan dilindungi oleh negara, sementara warga Negara juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum dan norma yang berlaku. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban negara, diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu yang terjadi. Misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, negara harus memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban serta menegakkan hukum terhadap pelaku agar tidak terulang kembali.

konsep yang penting dalam hak negara yaitu hak untuk ditaati segala peraturan yang ada dalam negara tersebut tidak secara spesifik dijelaskan dalam sumber yang disediakan. Adil dan keamanan bagi seluruh warganya. Hak negara merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh warganya. Ini merupakan prinsip dasar dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Pada sumber lain mengatakan bahwa hak negara yaitu hak untuk ditaati segala peraturan yang ada dalam negara tersebut. Namun, hak negara juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban kepada rakyatnya. Hak negara juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban kepada rakyatnya, sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sebagai contoh, di negara X, hak negara untuk memberikan keamanan kepada warganya diwujudkan melalui pemberian akses yang luas terhadap sistem keamanan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, negara X juga memberikan akses yang mudah bagi warganya untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Demokrasi dan kedaulatan rakyat

Demokrasi dan kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat penting dalam sebuah negara. Demokrasi menjamin partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan negara harus bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Dengan adanya demokrasi dan kedaulatan rakyat, diharapkan negara dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah konsep yang penting dalam pemikiran politik Mohammad Hatta. Hatta menekankan pentingnya pemahaman mengenai kedaulatan rakyat dan relevansi pemikirannya terhadap kondisi sosial demokrasi di Indonesia saat ini (Febri)

Dalam hal ini, keselarasan antara kewajiban dan hak negara harus dijalankan dengan prinsip demokrasi, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, penerapan demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Hal ini juga dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan mendukung konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat guna memperkuat fondasi negara yang demokratis.

Cara-cara konkrit bagi individu untuk mendukung dan memperkuat sistem demokrasi di negaranya. Cara nyata bagi individu untuk mendukung dan memperkuat sistem demokrasi di negaranya termasuk mempromosikan budaya demokrasi, mendukung lembaga-lembaga demokrasi, dan mengadvokasi pemerintahan yang demokratis (Yayusman: 2021) Melibatkan diri dalam proses pemilihan umum, berpartisipasi aktif dalam diskusi-diskusi politik, serta menyuarakan pendapat secara

terbuka juga merupakan langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu untuk mendukung dan memperkuat sistem demokrasi di negaranya. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan negara demokratis dan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Semua upaya ini akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

C. Kewajiban Negara Terhadap Warganya

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak asasi setiap warganya. Hal ini dilakukan dengan membentuk badan pertahanan dan keamanan seperti TNI Polri guna melindungi dari pelanggaran hak asasi warganya baik dari faktor internal maupun eksternal negara. Negara juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak asasi warganya dengan membentuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar pemenuhan kebutuhan hak asasi warganya dapat terealisasi dengan langkah yang nyata (Makikama: 2021)

Tanggung jawab negara terhadap warga negara juga mencakup perlindungan efektif menurut hukum internasional dan standar minimum yang diinginkan oleh negara maju. Dengan demikian, negara harus menjaga agar tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi warga negaranya, termasuk hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Dengan upaya tersebut, negara dapat memastikan bahwa semua warganya dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.

Negara juga harus memastikan bahwa semua warga negaranya memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tidak ada yang terpinggirkan atau tidak mendapat perlakuan yang adil. Dengan demikian, negara dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua warganya. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Sebagai contoh, sebuah negara dapat memastikan bahwa semua warganya memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan dengan memberikan layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi mereka yang tidak mampu membayar seperti kartu indonesia sehat. Selain itu, negara juga dapat memberikan program pelatihan kerja dan kesempatan kerja yang adil bagi semua warganya, tanpa memandang latar belakang mereka.

Negara juga harus memastikan bahwa setiap warga dapat mengakses pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan mereka. Dengan demikian, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi, dan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan adanya kebijakan yang inklusif dan progresif, negara dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua warganya. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih merata dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa terkecuali. Dengan adanya kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, semua warga negara dapat memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Selain itu, dengan adanya program pelatihan kerja yang adil, akan membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di negara ini. Dengan demikian, negara dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh warganya.

D. Hak warganegara dalam demokrasi

Dalam demokrasi, hak warganegara sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hak-hak seperti hak memilih dan dipilih, hak menyatakan pendapat, dan hak untuk berserikat merupakan fondasi dari sistem demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak warganegara ini, negara dapat memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan dihormati dalam masyarakat yang adil dan demokratis.

Hak warga negara dalam demokrasi meliputi hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD (Yasin) Hak-hak ini tidak hanya penting untuk menjamin keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka dapat diwujudkan melalui representasi yang adil dan akuntabel. Tanpa hak-hak ini, risiko terjadinya ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak warga negara harus menjadi prioritas utama dalam upaya untuk membangun dan mempertahankan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam sistem demokrasi ini tentunya harus terlaksana sistem demokrasi yang sehat. Sistem demokrasi yang sehat memberikan perlindungan penuh terhadap hak politik warga negara dengan menjamin hak-hak politik seperti hak berserikat, berkumpul, memilih, berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak-hak sipil dan politik lainnya. Sebaliknya, sistem yang tidak memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak politik warga negara dapat mengakibatkan pembatasan hak politik, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Kadek: 2023)

Contoh detail dari sistem demokrasi yang sehat adalah ketika setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat, memberikan kritik terhadap pemerintah, dan memilih wakil-wakilnya secara bebas dalam pemilihan umum. Namun, jika sistem demokrasi tidak sehat, maka masyarakat akan mengalami pembatasan dalam hak-hak politik mereka seperti intimidasi terhadap aktivis politik, pemboikotan pemilihan umum, dan penindasan terhadap suara-suara yang berbeda. Oleh karena itu, perlindungan penuh terhadap hak-hak politik warga negara sangat penting dalam memastikan terciptanya sistem demokrasi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, upaya untuk menjaga dan memperkuat sistem demokrasi yang sehat perlu terus dilakukan demi keberlangsungan negara yang demokratis dan beradab.

E. Keserasian antara hak dan kewajiban

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia di Indonesia menekankan pada keserasian antara hak dan kewajiban asasi manusia (Ali: 2011) Hak dan kewajiban tersebut harus selalu berjalan beriringan, penuntutan hak tanpa pelaksanaan kewajiban adalah hal yang bisa dianggap rancu dikarenakan sebagai warga negara tanggung jawab kepada negara adalah dengan melaksanakan kewajiban yang telah datur dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak dan kewajiban harus terus berjalan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi menuju ke arah yang demokratis, adil dan harmonis dengan didasari norma yang dipersyaratkan dalam konstitusi.

Untuk bisa mengejar kehidupan yang lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sepatutnya dijalin keselarasan, keserasian serta keseimbangan dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban itu sendiri. Dengan demikian hubungan antar negara dengan warga negara harus selalu berpegang teguh pada hak dan kewajiban yang saling melekat diantara keduanya, sehingga prosesnya akan berlangsung secara demokratis, adil dan harmonis dengan didasari norma.

Maka dari itu, hubungan antar warga negara dengan negara menggunakan hak dan kewajiban masing-masing selayaknya perlu dipetakan secara normative (Dinie: 2021)

Sebagai contoh, dalam hubungan antara negara dan warga negara, misalnya dalam hal pembayaran pajak. Warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sementara negara memiliki hak untuk menggunakan dana pajak tersebut untuk pembangunan dan pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara warga negara dan negara harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat tercapai. Sehingga, pemahaman yang jelas tentang norma dan aturan yang berlaku sangat penting dalam memastikan hubungan yang harmonis antara warga negara dan negara.

F. Contoh Tantangan dan hambatan harmonisasi hak dan kewajiban serta Solusi Dari Masalah Tersebut

Contoh tantangan dan hambatan dalam harmonisasi hak dan kewajiban seperti ketidakjelasan dan overlapping hukum antara hukum adat dan hukum nasional, kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, konflik dengan pembangunan dan investasi, serta ketidaksetaraan akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat (Muhammad: 2023) Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai harmonisasi hak dan kewajiban dalam masyarakat tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Ketidakjelasan dalam hukum antara hukum adat dan hukum nasional seringkali menyulitkan proses harmonisasi tersebut. Perlunya pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar harmonisasi hak dan kewajiban dapat tercapai secara adil dan merata. Kita lihat di Indonesia, masyarakat adat seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses keadilan karena ketidakjelasan dalam hukum antara hukum adat dan hukum nasional. Misalnya, ketika terjadi konflik atas tanah adat yang diambil untuk proyek pembangunan, masyarakat adat seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup mungkin timbul ketika terjadi perbedaan pendapat atau interpretasi terhadap peraturan yang ada.

Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, diharapkan dapat meminimalisir konflik yang mungkin timbul. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga negara juga perlu terus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan aturan yang berlaku semakin meningkat. Dengan demikian, terciptalah hubungan yang harmonis antara warga negara dan negara, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai harmonisasi hak dan kewajiban dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia menggarisbawahi pentingnya keseimbangan yang baik antara hak individu yang dilindungi hukum dengan kewajiban yang menetapkan norma perilaku. Keseimbangan ini tidak hanya mendukung kedaulatan rakyat dan kemakmuran bersama dalam ranah demokrasi, tetapi juga menanggapi tantangan seperti ketimpangan praktik hak dan kewajiban, konflik antara hukum adat dan nasional, serta perlindungan yang kurang bagi masyarakat adat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan sistem hukum melalui edukasi yang lebih luas, implementasi peraturan yang konsisten, dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia. Individu juga memiliki peran penting dalam mendorong harmonisasi ini dengan memahami dan menghormati hak serta kewajiban mereka, sehingga bersama-sama menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis di Indonesia.

REFERENCES

- Ali, Mahrus. "Pengawasan Peredaran Barang Cetak Due Process Of Law dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Jurnal Konstitusi* 8 No. 4, 2011, jurnal.konstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/180.
- Ari Hernawan, 2012, Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Mogok Kerja, dalam *Jurnal Mimbar hukm*, Volume24, Nomor 23.
- Asmendri, Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science* 6 No. 1, 2020, ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555.
- Dinie, Anggraeni Dewi. "Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*. 12, 2021, journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/274.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *QISTIE* 14 No. 2, 2022, publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/5590.
- FEBRI, SUWARSA L. U. V. I. "PEMIKIRAN POLITIK MOHAMMAD HATTA TENTANG DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT. PhD Diss. Universitas Siliwangi, repositori.unsil.ac.id/1057.
- Jatnika, Windan. "Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Hak Politik Warga Negara. *AHKAM* 1 No. 1, 2022, ejournal.yasin-alsys.org/index.php/ahkam/article/view/747. Kadek, Yogie Adi, et al. *Jurnal Konstruksi Hukum* 4 No. 3, 2023, www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/8046/5066.
- Makikama, Axel Alfa. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Indonesia di Kawasan Perbatasan Antara Indonesia dan Filipina. *Lex Administratum* 9 No. 7, 2021, ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34943.
- Muhammad, Akbar, and Arief Syahfrudin. "IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI NORMA HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Muhammad. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1 No. 5, 2023, jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/546.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Toba, Sastrawan Manik, and Riyanti. "Konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela Negara Dwi. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara* 1 No. 1, 2021, repository.stipram.ac.id/id/eprint/179.
- Yasin, Johan. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University, scholar.archive.org/work/gczgshlwmvd5rnqanvi/odlkmaq/access/wayback/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/download/541/pdf.
- Yayusman, Meilinda Sari. "Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 17 No. 1, 2021, journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3543.